



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-PD)
TAHUN 2024 - 2026

TONDANO 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Minahasa untuk jangka 20 (dua puluh) tahun. Renstra ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pendidikan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan yang disepakati bersama.

Renstra ini memuat visi, misi dan tujuan serta sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa sekaligus program-program dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Renstra ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Namun kami juga menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan dimasa mendatang.

Tondano, Desember 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Minahasa



H. TOMMY WUWUNGAN, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661112 199103 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah memerlukan dukungan perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa terkait dengan pembangunan daerah, setiap kepala daerah dalam satu periode jabatan harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 5 tahun sejak pelantikannya. Dalam mewujudkan pembangunan di daerah, kepala daerah didukung oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan kewenangannya. Masing-masing perangkat daerah tersebut kemudian menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merujuk pada RPJPD Kabupaten minahasa dari tahun 2005-2025 untuk jangka waktu yang sama.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Permendagri 86/2017) dan Imendagri No.70 tahun 2022

Renstra Pendidikan Kabupaten Minahasa tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di Kabupaten Minahasa dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.71-5952 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
19. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Veifikasi,Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran,Klasifikasi,kodevikasi dan nomenkelatur Perencanan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
20. Instruksi Nomor 52 Tahun 2022 Tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Instruksi Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2022.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pendidikan,
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan dalam mengkoordinasikan urusan pendidikan,
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah maupun dengan kebutuhan pihak terkait lainnya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 ini adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan publik,
- b. Memperkuat pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah urusan pendidikan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan RPJPD Kabupaten Minahasa tahun 2005-2025
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, maka tugas instansi ini adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa sebagaimana peraturan tersebut adalah:

1. Pelaksanaan perencanaan dan penetapan kebijakan operasional dibidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Perencanaan penyediaan dan pengawasan sarana dan prasarana;
3. Perencanaan penyusunan standar operasional pelayanan penyelenggaraan pendidikan dasar, PAUD/PNF dan PMPTK;
4. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;
5. Pengkoordinasian, failitasi pelaksanaan perencanaan, pengakatan, penempatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan;
7. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan;
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, menurut Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, yang mempunyai tugas:
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
 - d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat Dinas, mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan. dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi Sekretaris adalah:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
- c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan;
- e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program dan laporan;
- f. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- g. Penyusunan perencanaan di jajaran dinas pendidikan kabupaten;
- h. Penyusunan dan pengurusan serta pengevaluasian administrasi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta evaluasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pemrosesan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan di Dinas;
- j. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai tenaga kependidikan
- k. Pengevaluasian kepegawaian pada tenaga kependidikan
- l. Penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai pada tenaga kependidikan;
- m. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian pendidik yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiunan pegawai pada tenaga pendidik;
- n. Pemrosesan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dinas;
- o. Perumusan standar operasional prosedur kerja; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kurikulum SD/SMP, sarana prasarana dan kesiswaan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi bidang ini adalah:

- a. Perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan dasar
- b. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Dikdas;
- c. Perencanaan/fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
- d. Perencanaan dan penyusunan standar operasional pelayanan penyelenggaraan pendidikan dasar

- e. Perencanaan sistem informasi pelaksanaan pendidikan dasar
 - f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Dikdas;
 - g. Pelaksanaan pembinaan koordinasi, fasilitasi Dikdas dengan instansi / lembaga terkait dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
 - h. Pelaksanaan evaluasi program dan rumusan sistem kurikulum, pengelolaan sarpras, pemberdayaan kelembagaan dan pengendalian mutu SD, PLB dan SMP;
 - i. Perumusan rencana dan program Dikdas;
 - j. Pembinaan dan memotivasi pegawai di lingkungan bidang Dikdas;
 - k. Pemerosesan pemberian rekomendasi / ijin pendirian serta pencabutan ijin operasional dikdas;
 - l. Penyusunan pedoman penerimaan siswa baru (PSB);
 - m. Penyusunan laporan pelaksanaan Kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana dan prasarana SD dan SMP;
 - n. Penyusunan kurikulum mulok dan kalender pendidikan;
 - o. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan Akreditasi Sekolah;
 - p. Penyelenggaraan / fasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional.
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, kelembagaan dan kesetaraan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi bidang ini adalah:
- 1. Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
 - 2. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, monev program Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan NonFormal;
 - 3. Penyelenggaraan dan pengendalian penilaian hasil tahap akhir paket A, B, dan C;
 - 4. Pengembangan standar isi keterampilan fungsional, kepribadian profesional secara tematik dan konstruktif;
 - 5. Pengembangan proses pembelajaran tuntas dan maju berkelanjutan secara induktif dan fungsional;
 - 6. Pengembangan diversifikasi layanan sesuai kondisi, potensi dan karakteristik peserta didik dengan pengakuan terhadap kompetensi yang telah di miliki dan pembelajaran mandiri;
 - 7. Peningkatan muatan kecakapan hidup (life skill) seluruh mata pelajaran paket B dan C yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP);
 - 8. Perluasan akses paket A dan Paket B dalam mendukung penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun;
 - 9. Perencanaan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang meliputi program paket A, B dan C;

10. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana dan prasarana PAUD, program kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan masyarakat;
11. Pelaksanaan penguatan tatakelola pelayanan pendidikan keaksaraan yang berkelanjutan serta lembaga satuan PNF penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
12. Penerapan pembelajaran PAUD PNFI;
13. Penurunan jumlah penduduk penyandang buta aksara;
14. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan sasaran penyelenggaraan program keaksaraan dan kesetaraan;
15. Pelaksanaan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan mitra kerja berbagai lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
16. Pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana PAUD, program kesetaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
17. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi, promosi, hasil pelaksanaan program lembaga PNFI;
18. Pelaksanaan standarisasi dan akreditasi lembaga, taman bacaan masyarakat (TBM) dan PKBM;
19. Pembinaan dan pengembangan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
20. Penyelenggaraan, mengendalikan serta mengawasi Ujian Nasional Kursus PNF;
21. Pengadaan pembinaan lembaga kursus PNFI yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang mencakup aspek kelembagaan, tenaga pendidik dan peserta didik menurut jenis pendidikan;
22. Pemberian perizinan lembaga penyelenggaraan program PNFI yang diselenggarakan oleh masyarakat;
23. Pengadaan pendataan dan evaluasi lembaga kursus PNFI yang diselenggarakan oleh masyarakat;
24. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Seksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
25. Penelitian dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dibuat oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
26. Penyebarluasan petunjuk pelaksanaan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
27. Penyusunan petunjuk pelaksanaan wajib belajar, kurikulum, kalender pendidikan, evaluasi belajar sekolah Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
28. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dukungan teknis, administratif dan membina prasarana bidang;
29. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

30. Pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan nonformal dan informal;
 31. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal.
1. Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas menyelenggarakan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi bidang ini adalah:
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK/PAUD, SD dan SMP;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penempatan tenaga kependidikan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga pendidik;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan penetapan angka kredit tenaga pendidik;
 - e. Pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi teknis dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan;
 - h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan Karier Tenaga Pendidik;
 - i. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
 - j. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
 - k. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan pembinaan teknis fungsional;
 - l. Penyusunan dan pengurusan serta pengevaluasian administrasi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta evaluasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - m. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai dan tenaga kependidikan.
 6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 7. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF – SKB)

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

Sumber daya pendukung terlaksananya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa didukung baik oleh sumber daya manusia maupun sumber daya sarana/prasarana.

Sumber daya manusia terdiri dari sejumlah ANS struktural maupun fungsional sebagaimana disajikan pada table berikut.

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Struktural dan Fungsional Dinas Pendidikan

No	Uraian	Pejabat Eselon (orang)			Jumlah Menurut Golongan (orang)					Diklat Penjeja ngan	Jlh
		II	III	IV	I	II	III	IV	Jlh		
1.	Staf Dinas Kabupaten	1	4	7			19	6	25	Sepada /Adum/ Pim IV	3
2.	Staf SPNF SKB Pendidikan Kecamatan	-	-	6		14	36	5	55	Spama/ Pim III	
3.	Fungsional Pengawas SD/SMP	-	-	-	-	-	1	39	40		
4.	Fungsional Guru	-	-	-	-	76	1107	1081	2264		
5.	Staf Pelaksana di Sekolah	-	-	-	-	123			123		
Jumlah		1	4	17	0	215	1171	1130	2516		3

Sumber daya sarana/prasarana yang dapat menunjang pelayanan dalam lingkup dinas terdiri dari:

1. Sarana/prasarana di Kantor Kabupaten
2. Sarana/prasarana di SPNF/SKB
3. Sarana/prasarana di masing-masing sekolah/satuan pendidikan.

Dan pada table berikut:

Tabel 2.2

NOMOR Urut	Uraian	Volume	Keterangan
1	2	5	7
1	Mobil Station Wagon	1	Kelayakan 65%
2	Air Conditioning Unit	1	Kelayakan 20%
4	Mesin Tik Man (11-13)	3	Kelayakan 40%
5	Mesin Hitung Lainnya	3	Kelayakan 70%
7	Rak Kayu	1	Kelayakan 80%
8	Brandkas	1	Kelayakan 30%
9	Papan Visual	1	Kelayakan 70%
1	Lemari Kayu	15	Kelayakan 70%
12	Meja Rapat	3	Kelayakan 70%
14	Kursi Rapat	50	Kelayakan 60%
15	Meja Komputer	2	Kelayakan 50%
16	Sofa	2	Kelayakan 60%
18	Radio	1	Kelayakan 0%
19	Dispencer	7	Kelayakan 70%
21	Lampu Hias	3	Kelayakan 80%
22	P.C. Unit	8	Kelayakan 70%
23	Printer	6	Kelayakan 60%
25	Scanner	3	Kelayakan 60%
26	Peralatan Personal Komp. Lainnya	7	Kelayakan 70%
28	Unintemuptible P.S.(Ups)	2	Kelayakan 80%
29	Telephone (Pabx)	1	Kelayakan 0%
30	Meja Kerja		Kelayakan 70%
32	Meja Biro	2	Kelayakan 80%
33	Meja 1/2 Biro	21	Kelayakan 70%
35	Tanah Bang. Kantor Pemerintah	11.300 M2	
36	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Kelayakan 90%
37	Proyektor+Attachment	1	Kelayakan 70%
39	Tv Monitor	6	Kelayakan 90%
40	Gedung Kant.Semi Permanen	M2	Kelayakan 70%
42	Kursi Kerja Pejabat	16	Kelayakan 70%
43	Kit Matematika	1	Kelayakan 80%
44	Pagar	M2	
46	Bidang Study Bhs Indonesia	1	Kelayakan 80%
47	Alat Peraga Matematika	1	Kelayakan 80%
49	Kit. I P A	1	Kelayakan 80%
50	Bidang Study IPS	1	Kelayakan 80%

51	Bidang Study Ketrampilan	1	Kelayakan 80%
53	Bidang Study Olahraga	1	Kelayakan 80%

2.3 Kinerja Pelayanan PD Dinas Pendidikan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perangkat daerah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

:

Table 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Periode Lalu

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targe t NSPK	Target IKK	Targe t Indik ator Lainn ya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																0
	Unsur penunjang urusan pemerintahan				75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		80%	85%	90%	92%	95%	80%	85%	90%	92%	100 %	100%	100%	100%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan Perbub.		80%	83%	85%	90%	95%	80%	83%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		80%	83%	85%	90%	95%	80%	83%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemda sesuai RKBMD SKPD		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		80%	90%	80%	85%	90%	80%	90%	80%	85%	100 %	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				80%	95%	80%	85%	95%	80%	95%	80%	85%	100 %	100%	100%	100%

		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Partisipasi Murni (APM)		92%	100%	92%	95%	100%	92%	100%	92%	95%	100 %	100%	100%	100%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka partisipasi murni (APM)		86%	90%	86%	86%	90%	86%	90%	86%	86%	100 %	100%	100%	100%
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		82%	85%	88%	90%	92%	82%	85%	88%	90%	100 %	100%	100%	100%
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase pengelolaan pendidikan yang baik		80%	90%	80%	85%	90%	80%	90%	80%	85%	100 %	100%	100%	100%
3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase pengelolaan pengembangan kurikulum yang baik		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah kurikulum yang ditetapkan dan tersusun pendidiknya dasar		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah kurikulum yang ditetapkan dan tersusun Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang baik		80%	90%	80%	85%	90%	80%	90%	80%	85%	100 %	100%	100%	100%
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang baik		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100 %	100%	100%	100%
5		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan		75%	80%	85%	90%	95%	75%	80%	85%	90%	100 %	100%	100%	100%

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Periode lalu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2022	2022	2023	2019	2020	2022	2022		1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,324	1,688	1,891	2,080	2,288	1,324	1,688	1,891	2,080		9,99	100	100	100		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	151	1,650	1660	1,826	2,009	151	1,650	1660	1,826		9,99	100	100	100		
Program peningkatan disiplin aparatur	40	63	66	74	100	40	63	66	74		9,99	100	100	100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	194	204	250	275	344	194	204	250	275		9,99	100	100	100		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15	16	45	65	85	15	16	45	65		9,99	100	100	100		
Program Perencanaan Perangkat Daerah		15	30	44	63		15	30	44		9,99	100	100	100		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	699	2,500	2650	2,915	3207	699	2,500	2650	2,915		9,99	100	100	100		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	14,146	16,268	18,708	21,514	24096	14,146	16,268	18,708	21,514		9,99	100	100	100		
Program Pendidikan Non Formal	6,475	6,637	7,301	8,396	9235	6,475	6,637	7,301	8,396		9,99	100	100	100		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7,054	7,900	9,007	9,907	11393	7,054	7,900	9,007	9,907		9,99	100	100	100		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	144	250	347	427	491	144	250	347	427		9,99	100	100	100		
Program Peningkatan Mutu SD (DAK	8,617	8,703	9,573	10,531	12005	8,617	8,703	9,573	10,531		9,99	100	100	100		
Program Peningkatan Mutu SMP (DAK	3,430	3,499	3,918	4,506	5137	3,430	3,499	3,918	4,506		9,99	100	100	100		
Program BOS SD	11,761	11,996	13,434	15,449	16994	11,761	11,996	13,434	15,449		9,99	100	100	100		
Program BOS SMP	11,564	11,795	13,010	13,661	15027	11,564	11,795	13,010	13,661		9,99	100	100	100		
BIDANG PENDIDIKAN																
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	96	152	261	326	506	96	152	261	326		100	100	100	100		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	144	151	159	198	268	144	151	159	198		100	100	100	100		

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainn	Target Renstra SKPD Tahun					2023	Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun			
					2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	% Angka Partisipasi Murni (APM) SD				90,5	91,7	92,98	93,98	94,1	95	91,4	92,2	95,2	91,1	89,5	100,99	100,55	102,39	96,94
2	% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP				65,45	66,25	67,1	68,2	70,2	65	66,1	70,3	74,1	66,2	66,1	100,99	106,11	110,43	97,07
3	% Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				100	101,77	102,27	103,22	105	100	103,77	102,45	107,2	109,2	103,1	103,77	100,67	104,82	105,79
4	% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP				100	102,34	102,77	103,62	106,45	100	133,37	131,61	131,34	107,2	108	133,37	128,60	127,80	103,45
5	Angka Melek Huruf				98,5	98,45	98,65	99,89	100	99,99	99,9	99,85	99,87	99,84	98,96	98,60	98,60	98,78	100,05
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,006	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP				0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,04	0,15	0,11	0,02	0,11	0,12	99,67	99,56	99,56	99,87
8	Angka Kelulusan SD				98,75	98,75	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	99,91	99,96	101,27	101,27	100,00	99,91
9	Angka Kelulusan SMP				99,92	99,92	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	99,85	99,53	100,00	100,00	100,00	99,85
10	% Guru sesuai kualifikasi S1/D4				90,12	90,12	92,00	95,00	99,39	87,45	89,76	90,01	86,76	94,28	95,58	99,60	99,98	99,39	99,98
11	Rasio Guru Per Murid SD				1 : 19	1 : 19	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1:22	1 : 19	1 : 19	1 : 18	1 : 17	1 : 17	1 : 19	1 : 19	1 : 18	1 : 16

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	19	20
12	Rasio Guru Per Murid SMP				1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 15	1 : 14	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 17		100,00	100,00	100,00	98,00
11	Meningkatnya Aplikasi MBS				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

NO	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJPD Kabupaten Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Sampai Dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan (Tahun 2022)			
																	I		II	
1	2	3					4			5	6		7		8		9		10	
		1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	Pendidikan																	
		1					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
		1	01				Unsur penunjang urusan pemerintahan													
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
							Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		1	01	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1 Dok.	23,000,000.00			12 bulan	20,000,000				
				1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1 Dok.	4,025,000.00			3 kali	3,500,000				
		1	01	1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1 Lap.	4,025,000.00			1 kali	3,500,000				
				1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1 Dok.	4,025,000.00			2 kali	3,500,000				
		1	01	1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1 Lap.	4,025,000.00			1 kali	3,500,000				

				1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1 Dok.	5,175,000.00			1 kali	4,500,000				
		1	01	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							279,170,417,000				
				1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah					14 bulan	279,148,917,000			31.90	#####
		1	01	1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		3,450,000.00			1 kali	3,000,000				
				1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		5,750,000.00			1 kali	5,000,000				
		1	01	1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		4,025,000.00			3 kali	3,500,000				
				1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		11,500,000.00			1 laporan	10,000,000				
		1	01	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			47,150,000.00				41,000,000				
		1	01	1	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		3,450,000.00			1 dokumen	3,000,000				
		1	01	1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		43,700,000.00			4 dokumen	38,000,000				
		1	01	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			457,700,000.00				398,000,000				
		1	01	1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		43,700,000.00			80 pasang	38,000,000				
		1	01	1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		414,000,000.00			3 orang	360,000,000			89.47	322,082,850
		1	01	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			664,125,000.00				577,500,000				
		1	01	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		69,000,000.00			12 bulan	60,000,000				
		1	01	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan		92,000,000.00			12 bulan	80,000,000				

										Perangkat Daerah									
				1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		212,750,000.00			12 bulan	185,000,000			
		1	01	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		8,625,000.00			12 bulan	7,500,000			
		1	01	1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		48,875,000.00			12 bulan	42,500,000			
		1	01	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		232,875,000.00			12 bulan	202,500,000		11.72	23,728,000
		1	01	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,635,875,000.00				1,422,500,000			
		1	01	1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		1,635,875,000.00			12 bulan	1,422,500,000			
		1	01	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			968,530,000.00				842,200,000			
		1	01	1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		3,680,000.00			12 bulan	3,200,000			
		1	01	1	01	01	2.08	02	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		10,350,000.00			12 bulan	9,000,000			
		1	01	1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		195,500,000.00			12 bulan	170,000,000			
		1	01	1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		759,000,000.00			20 orang	660,000,000	#####	73,600,000	16.73 110,400,000
		1	01	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101,775,000.00				88,500,000			
		1	01	1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		4,025,000.00			20 orang	3,500,000			
		1	01	1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		97,750,000.00			12 ruang	85,000,000			

		1	01	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			#####				45,164,373,000				
		1	01	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			#####				18,988,073,000				
		1	01	1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		966,000,000.00			4 unit	840,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		384,100,000.00			5 unit	334,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		517,500,000.00			3 sekolah	450,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		379,500,000.00			3 unit	330,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		2,967,658,950.00			17 unit	2,580,573,000				
				1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		715,300,000.00			3 sekolah	622,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		287,500,000.00			14 unit	250,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		575,000,000.00			50 unit	500,000,000				
				1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		542,800,000.00			16 unit	472,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	17	PengadaanPerlengkapan Siswa	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		156,975,000.00			4130 orang	136,500,000				
		1	01	1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		253,000,000.00			1 paket	220,000,000				
				1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		69,230,000.00			1 laporan	60,200,000				
		1	01	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		27,600,000.00			16 unit 150 orang	24,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		177,100,000.00			150 orang	154,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		292,100,000.00			1 dokumen	254,000,000				
		1	01	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		#####			344 unit	11,760,800,000				
		1	01	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			#####				15,804,000,000				

		1	01	1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		690,000,000.00			2 sekolah	600,000,000						
		1	01	1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		690,000,000.00			2 sekolah	600,000,000						
		1	01	1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		460,000,000.00			2 sekolah	400,000,000						
				1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		1,150,000,000.00			5 sekolah	1,000,000,000						
		1	01	1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		690,000,000.00			5 sekolah	600,000,000						
				1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		517,500,000.00			3 sekolah	450,000,000						
		1	01	1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		253,000,000.00			8 sekolah	220,000,000						
		1	01	1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		391,000,000.00			12 sekolah	340,000,000						
		1	01	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		#####			102 sekolah	11,564,000,000						
		1	01	1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		34,500,000.00			1 dokumen	30,000,000						
		1	01	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			6,820,995,000.00				5,931,300,000						
		1	01	1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		391,000,000.00			5 sekolah	340,000,000						
		1	01	1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		517,500,000.00			5 sekolah	450,000,000						
		1	01	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		345,000,000.00			300 orang	300,000,000						
		1	01	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		5,567,495,000.00			235 sekolah	4,841,300,000			43.43	2,102,700,000		
		1	01	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			5,107,150,000.00				4,441,000,000						
		1	01	1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		747,500,000.00			5 sekolah	650,000,000						
		1	01	1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		517,500,000.00			5 sekolah	450,000,000						

		1	01	1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		773,950,000.00			6 sekolah	673,000,000						
		1	01	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		198,950,000.00			6 sekolah	173,000,000						
		1	01	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar		2,869,250,000.00			9 sekolah	2,495,000,000			50.82		1,268,000,000	
		1	01	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			138,000,000.00				120,000,000						
		1	01	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			97,750,000.00				85,000,000						
		1	01	1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase penyediaan kurikulum pendidikan dasar		17,250,000.00			1 dokumen	15,000,000						
		1	01	1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase penyediaan kurikulum pendidikan dasar		11,500,000.00			1 dokumen	10,000,000						
		1	01	1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase penyediaan kurikulum pendidikan dasar		40,250,000.00			1 dokumen	35,000,000						
		1	01	1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase penyediaan kurikulum pendidikan dasar		28,750,000.00			1 dokumen	25,000,000						
		1	01	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			40,250,000.00				35,000,000						
		1	01	1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase penyediaan kurikulum pendidikan dasar		17,250,000.00			1 dokumen	15,000,000						
		1	01	1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase penyediaan kurikulum pendidikan dasar		11,500,000.00			1 dokumen	10,000,000						
		1	01	1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase penyediaan kurikulum pendidikan dasar		11,500,000.00			1 dokumen	10,000,000						
		1	01	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			5,506,545,000.00				4,788,300,000						
		1	01	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			5,506,545,000.00				4,788,300,000						
		1	01	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang baik		34,500,000.00			1 dokumen	30,000,000						
		1	01	1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang baik		5,472,045,000.00			444 sekolah 1 kegiatan 1 dokumen 2100 orang	4,758,300,000			2.10		100,000,000	

		1	01	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			88,550,000.00				77,000,000						
		1	01	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			34,500,000.00				30,000,000						
		1	01	1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan		17,250,000.00			1 dokumen	15,000,000						
		1	01	1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan		17,250,000.00			1 dokumen	15,000,000						
		1	01	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			54,050,000.00				47,000,000						
		1	01	1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan		17,250,000.00			1 dokumen	15,000,000						
		1	01	1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan		13,800,000.00			1 dokumen	12,000,000						
		1	01	1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan		23,000,000.00			220 dokumen	20,000,000						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kiner									Koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar													
Faktor Penghambat Pencapaian									Efisiensi anggaran													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Ber									Perencanaan kegiatan ke depan agar lebih akurat. perlu perhatian agar anggaran benar2 sesuai dengan kebutuhan.													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Beri									Selanjutnya dalam penyusunan DPA agar lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan.													

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rensta K/L, Renstra PD Provinsi terkait, RTRW dan hasil Analisis KLHS. Berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa kedepannya.

Tantangan :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data-data pendidikan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban;

Peluang :

1. Tersedianya dukungan anggaran serta sarana prasarana kerja yang mendukung;
2. Adanya kebijakan nasional yang mendukung program-program pendidikan seperti BOS, DAPODIK, Dana Bantah (Bantuan Pemerintah) dan lain sebagainya ;
3. Tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas Mutu Pembelajaran belum maksimal	1. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu 2. Kondisi sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang kurang representatif untuk proses belajar mengajar 3. Masih kurang lengkapnya Alat Peraga Edukasi (APE) outdoor dan mebeleur PAUD serta peralatan penunjang IT untuk SD dan SMP 4. Masih adanya kualifikasi pendidik yang belum S1 dan linier 5. Kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1. Minimnya Bimtek tentang peningkatan kompetensi dan penguasaan IT secara berkelanjutan 2. Masih adanya kondisi kelas yang tidak sesuai SNP / kondisi rusak sedang dan rusak berat 3. Untuk Lembaga PAUD, SD dan SMP sebagian besar masih kurang lengkap fasilitas sarana penunjang PBM dan IT untuk proses pembelajaran 4. Minimnya program beasiswa dari pemerintah untuk pendidik yang melanjutkan ke jenjang S1 dan linier 5. Pemetaan kembali untuk pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan

Permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tercukupinya sarana, prasarana, dan alat peraga edukasi (APE) PAUD (indoor dan outdoor) baik di TK, KB (Kelompok Bermain), TPA (Taman Penitipan Anak) maupun SPS (PAUD);
- 2) Belum semua tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, KB, TPA dan SPS (PAUD) memahami kebutuhan esensial anak dalam belajar;
- 3) Kualitas pendidikan dasar masih perlu ditingkatkan termasuk di dalamnya kuantitas, kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas, penilik);
- 4) Belum tercukupinya sarana dan prasarana sekolah (perpustakaan, laboratorium, peralatan praktek, serta peralatan penunjang IT untuk SD dan SMP);
- 5) Transparansi dan akuntabilitas manajemen pendidikan masih perlu ditingkatkan;
- 6) Lembaga-lembaga pendidikan non formal dalam menunjang keterampilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan belum terkoordinasi, terpadu dan terintegrasi dalam menunjang penurunan pengangguran di Kabupaten Minahasa.

3.2 Telaan dan Program dari RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2025

3.3. VISI

Pemerintah Kabupaten Minahasa Memiliki Visi Dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah:

- **“Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera”**

Visi ini tentunya telah diselaraskan dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Penjelasan kata-kata kunci dalam Visi di atas adalah sebagai berikut.

1. **Mandiri:** Maju dan mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, berkompetisi di segala bidang dan Konsisten dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, supremasi dan kepastian hukum.
2. **Sejahtera:** Kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur serta bebas dari segala gangguan, serta mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya untuk generasi sekarang dan mendatang.

Selanjutnya, Visi di atas perlu dioperasionalisasi dalam pernyataan Misi. Praktisnya, membawa Kabupaten Minahasa menjadi Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera tidak bisa hanya bertahta dalam proses evolusi alamiah belaka. Visi ini perlu dicapai secara strategis. Sebagai sebuah ortodoksi atau prinsip ideal yang abstrak, visi tersebut perlu diterjemahkan dalam ortopraksi atau petunjuk-petunjuk praktis dan pedoman yang menunjukkan bagaimana Visi abstrak tersebut mendapatkan wujud operatifnya.

Kelima pernyataan Misi Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*;
2. Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya *Mapalus*;
3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan;
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur

Dinas Pendidikan dalam hal ini memiliki Misi Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya *Si Tou Timou Tumou Tou* dan Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya <i>Si Tou Timou Tumou Tou</i>;	2.Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya <i>Mapalus</i>;	Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat

3.4. Misi Dinas Pendidikan

Untuk mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Pendidikan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Bupati pertama, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*

Misi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan misi Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan (SNP).
3. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Minahasa, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, sebagai berikut:

Faktor Pendorong :

Dana tersedia secara berkesinambungan. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang telah dituangkan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa.

- Tersedia peralatan penunjang kegiatan seperti alat audio visual dan komputer.
- Terlaksananya berbagai pelatihan secara kontinyu.
- Adanya Satuan Pendidikan yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya dalam pelayanan Pendidikan.
- Adanya dukungan strategis dan politis di tingkat legislatif maupun eksekutif.

- Kondisi geografis yang mendukung karena seluruh kelurahan dan desa dapat dijangkau dengan roda empat

Faktor Penghambat :

- Belum memadainya jumlah dan jenis tenaga profesional
- Masih adanya kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai baik pendidik maupun tenaga kependidikan.
- Adanya penurunan kualitas pendidikan.
- Masih adanya layanan pembelajaran secara konvensional.
- Masih belum optimalnya manajemen pendidikan.
- Adanya penurunan moralitas peserta didik.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Rentra Provinsi

- Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa.

-

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa berdasarkan Renstra

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta faktor penghambat dan pendorong

No.	Renstra K/L	Renstra OPD Provinsi Sulawesi Utara	Permasalahan Pelayanan (OPD) Kabupaten Minahasa	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan	Pemerataan aksesibilitas yang kurang merata di semua jenjang	Belum memadainya fasilitas sarana prasarana yang mendukung PBM secara menyeluruh di semua jenjang	Penyediaan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur layanan pendidikan
2	Terwujudnya Pembelajaran yang Bermutu	Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan	Masih kurang ratanya pementaan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan	Kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi	Diadakannya pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan RTRW Kabupaten Minahasa dapat diidentifikasi permasalahan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Berdasarkan Telaahan RTRW Kabupaten Minahasa

No.	Kebijakan RTRW Kabupaten Minahasa	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kebijakan penataan struktur ruang wilayah Kabupaten	Belum tercukupinya fasilitas sarana dan prasarana secara menyeluruh	Belum meratanya akses layanan pendidikan	Penyediaan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur layanan pendidikan
2	Kebijakan penataan pola ruang wilayah Kabupaten	Belum tercukupinya fasilitas sarana dan prasarana secara menyeluruh	Belum meratanya akses layanan pendidikan	Penyediaan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur layanan pendidikan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk rencana pembangunan sekolah dari tingkat TK, SD dan SMP bahkan perguruan tinggi pada penyusunan RTRW Kabupaten Minahasa sebagai upaya untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, maka isu strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan

- Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Minahasa harus mampu menjamin akses layanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.
- Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Adanya brand image sekolah-sekolah favorit yang menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di suatu sekolah, telah menciptakan perbedaan dalam kuantitas dan kualitas layanan dalam pendidikan, telah menutup akses bagi kelompok siswa yang membutuhkan peningkatan kualitas pendidikannya tetapi tidak mampu mengakses akibat adanya persaingan dalam sistem yang belum terevaluasi objektivitasnya.
- Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar lembaga pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan pendidikan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.

- Disisi lain dalam upaya untuk menjamin semua warga Kabupaten Minahasa memperoleh pendidikan, maka siswa-siswa dari keluarga miskin atau tidak mampu dibiayai atau diberikan beasiswa oleh Pemerintah Daerah baik mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta, baik mereka yang bersekolah didalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten Minahasa.
- Untuk menjadikan Kabupaten Minahasa sebagai pusat pendidikan yang berkualitas secara bertahap prasarana dan sarana bagi pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang memenuhi mutu standar pelayanan minimal menjadi tugas pemerintah Kabupaten Minahasa. Indikasi Kabupaten Minahasa tumbuh menjadi pusat pendidikan adalah terdapat beberapa perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Minahasa yang berpotensi untuk menjadikan Kabupaten Minahasa sebagai pusat pendidikan.

Perubahan paradigma yang berlaku secara nasional itu berdampak pula pada system penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi, meski dalam skala terbatas. Misalnya pada kurikulum pembelajaran, dimana terdapat perimbangan muatan pembelajaran untuk kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Sedangkan standar kelulusan masih menggunakan standar yang bersifat nasional dengan indicator kegiatan yaitu Ujian Akhir Nasional. Pada sisi lain terdapat pula dua sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan, dari APBN dan APBD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa berdasarkan misi di atas adalah:
Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

• visi : Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera						
• MISI 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya Si Tou Timou Tumou Tou						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	Mewujudkan masyarakat Minahasa yang mandiri dan maju berdasarkan Falsafah Si Tou Timou Tumou Tou	Meningkatnya Tingkat dan Mutu Pendidikan, Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar, Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan tersedianya kurikulum yang andal dan Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah	9,87	9,89	9,90
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	85,5%	86,06%	86,7%
			Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,85	99,87	99,90
			Angka Harapan Sekolah	12,30	12,40	12,45
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,04	0,03	0,02
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,06	0,05	0,02
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,9	99,9	99,9
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,9	99,9	99,9
			Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	93%	95%	97%
			Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	60%	62%	65%
			Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	95%	97%	100%
			Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	93%	95%	100%
			Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	93%	95%	97%
			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	60%	62%	65%
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:31	1:35	0.32
			Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:16	1:18	1:20

			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar di PerKabupatenan	1:16	1:16	1:16
			Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1,45	1,48	1,49
			Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	148,54	150,4	151,96
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86%	86,55%	87,45%
			Sekolah PAUD kondisi bangunan baik	65%	66%	68%
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	70,25	75,30	78,34
			Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	82%	86%	90%
			Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	95,87	95,87	97,78
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	3	4	4
			Nilai Sakip	B	B	B
			Cakupan perwujudan SPM bidang Pendidikan	100%	100%	120%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Table V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Minahasa yang Mandiri, dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya Si Tou Timou Tumou Tou			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan masyarakat Minahasa yang mandiri dan maju berdasarkan Falsafah Si Tou Timou Tumou Tou	Melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melaksanakan Pengendalian Perizinan Pendidikan dan Menunjang Urusan pemerintah daerah	Pengelolaan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar sampai PNF dengan mengembangkan kurikulum PAUD/PNF dan Pendidikan Dasar, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan mengendalikan perizinan pendidikan.	1. Penyediaan Layanan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Masyarakat/ Kesetaraan 2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan yang sesuai kebutuhan masyarakat 3. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas

BAB VI

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH KAB. MINAHASA TAHUN PERIODE 2024 SD 2026

SUB TAHAP RANCANGAN

AKHIR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Pendidikan															
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar Dan Kesetaraan														
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
				Persentase Penduduk Usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan SMP	75 %	75 %	59.653.543.000,00	80 %	63.220.800.000,00	85 %	69.102.948.597,00	85 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
				Persentase Penduduk Usia 5-6 tahun yang mendapatkan layanan PAUD	75 %	75 %	0,00	80 %	0,00	85 %	0,00	85 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
				Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun yang mendapatkan layanan SD	75 %	75 %	0,00	80 %	0,00	85 %	0,00	85 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
				Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan	75 %	75 %	0,00	80 %	0,00	85 %	0,00	85 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	

				Presentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang memenuhi Kompetensi Minimum	28.5 %	28.5 %	0,00	30.6 %	0,00	35.2 %	0,00	35.2 %	0,00	DINAS PEN DIDIKAN	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Angka Partisipasi Murni Dan Angaka Partisipasi Kasar	75 %	75 %	29.323.222.000,00	80 %	30.310.350.000,00	85 %	32.104.750.000,00	90 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
				Angka Partisipasi Murni Dan Angaka Partisipasi Kasar	75 %	80 %	23.037.579.000,00	85 %	24.290.150.000,00	90 %	24.205.750.000,00	90 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
				Angka Partisipasi Murni Dan Angaka Partisipasi Kasar	75 %	75 %	4.697.402.000,00	80 %	6.110.150.000,00	85 %	10.206.908.597,00	90 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
				Angka Partisipasi Murni Dan Angaka Partisipasi Kasar	75 %	75 %	2.595.340.000,00	80 %	2.510.150.000,00	85 %	2.585.540.000,00	90 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
				Persentase Pengelolaan Pengembangan Kurikulum yang baik	76,55 %	76,55 %	138.913.001,00	78,63 %	145.000.000,00	80,92 %	146.250.000,00	80,92 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
				Persentase penyediaan kurikulum Pendidikan Dasar	75 %	75 %	0,00	80 %	0,00	85 %	0,00	85 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar												
				Presentase Penyediaan Kurikulum Pendidikan Dasar	75 %	75 %	97.750.000,00	80 %	102.750.000,00	85 %	103.000.000,00	85 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	

		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal												
				Presentase Penyediaan Kurikulum Pendidikan Dasar	75 %	75 %	41.163.001,00	80 %	42.250.000,00	85 %	43.250.000,00	85 %	0,00	DINAS PEN DIDIKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
				Persentase Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang baik	83 %	83 %	5.506.545.000,00	86 %	5.864.700.000,00	90 %	6.075.558.000,00	90 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
				Presentase Penyediaan Kurikulum Pendidikan Dasar	75 %	75 %	5.506.545.000,00	80 %	5.864.700.000,00	85 %	6.075.558.000,00	90 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN												
				Persentase Pengembangan Pendidikan dan Teenage Kependidikan yang back	90 %	90 %	61.750.000,00	100 %	65.500.000,00	100 %	69.500.000,00	100 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
				Persentase pengembangan pendidikan dan teenage kependidikan yang back	90 %	90 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat												
				Presentase Pengembangan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Yang Baik	90 %	90 %	44.500.000,00	100 %	45.500.000,00	100 %	47.500.000,00	100 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Presentase Pengembangan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Yang Baik	90 %	90 %	17.250.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	22.000.000,00	100 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
Meningkatkan Kualitas Pendidikan															
	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar Dan Kesetaraan														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
				Nilai IKM	3 Nilai	3 Nilai	0,00	3 Nilai	0,00	3 Nilai	0,00	3 Nilai	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
				Nilai Sakip	B Nilai	B Nilai	295.029.264.140,00	B Nilai	299.414.015.141,00	B Nilai	301.815.758.544,00	B Nilai	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
				Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	75 %	75 %	25.000.000,00	80 %	32.000.000,00	85 %	34.000.000,00	90 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
				Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	85 %	90 %	294.142.220.140,00	95 %	298.430.015.141,00	98 %	300.804.758.544,00	99 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
				Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	80 %	85 %	385.240.000,00	90 %	408.000.000,00	95 %	413.000.000,00	97 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	

		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	85 %	85 %	67.428.000,00	90 %	75.000.000,00	95 %	80.000.000,00	96 %	0,00	DINAS PEN DIDIKAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
				Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	80 %	85 %	173.376.000,00	90 %	180.000.000,00	95 %	185.000.000,00	96 %	0,00	DINAS PEN DIDIKAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
				Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	80 %	85 %	136.000.000,00	90 %	144.000.000,00	95 %	149.000.000,00	97 %	0,00	DINAS PEN DIDIKAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Daerah	75 %	80 %	100.000.000,00	85 %	145.000.000,00	90 %	150.000.000,00	95 %	0,00	DINAS PEN DIDIKAN	

Tabel 6.2

Rencana Sub-Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa 2005 - 2025

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Program Penunjang Urusan Pemerintah		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah & Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen
	Dokumen Perjanjian Kinerja & Perjanjian Kerja Perubahan	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen
	Dokumen Evaluasi Kinerja Pendidikan	Dokumen
	Dokumen Rekomendasi Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman	Dokumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji & Tunjangan Pegawai	Dokumen
	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Dokumen
	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD	Dokumen
	Pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Dokumen
	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Dokumen

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Pengurus Barang	Dokumen
	Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan	Dokumen
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Keuangan	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen
	Dokumen Laporan Aset/ BMD Semesteran	Dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Layanan Administrasi Kepegawaian ASN	Dokumen
	Laporan Pelaksanaan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi	Dokumen
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat-alat Listrik/Penerangan Kantor	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	%
	Penyediaan Makan & Minum Rapat	%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan & Minum Kunjungan Tamu	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip, Kepustakaan, & Surat-Menyurat	%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Informasi & Dokumentasi Perangkat Daerah	Dokumen
	Website Termutakhirkan	%

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Mebel	Penyediaan Mebel	Barang
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jasa Langganan Tersedia	Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Keamanan Kantor	Bulan
	Layanan Kebersihan Kantor	Bulan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Terpelihara	Bulan
	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Bulan
Pemeliharaan Mebel	Mebel Kantor Terpelihara	Bulan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Kerja Kantor Terpelihara	Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Terpelihara	Bulan
	Taman Terpelihara	Bulan
Program Pengelolaan Pendidikan		
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)		
Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	%
Penambahan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/Tata Usaha	Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Baru	%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Baru	%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Baru	%

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha	Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi	%
Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Mebel Sekolah	%
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah Terpelihara	%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Penyediaan Perlengkapan Sekolah	%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Penyediaan Perlengkapan Siswa/Peserta Didik	%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin/Rentan Miskin	%
	Verifikasi Data Peserta Didik Penerima PIP	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat Praktik & Peraga Siswa	%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dukungan Pengembangan Kurikulum SD	Dokumen
	Dukungan Penyelenggaraan Ujian SD	%
	Peta Hasil Proses Belajar Mengajar SD	Dokumen
Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Dukungan Pengembangan Karakter Peserta Didik	%
	Dukungan Pengembangan Minat, Bakat, & Kreativitas Siswa	%

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bagi Satuan Pendidikan SD	Dokumen Nominatif PTK SD	Dokumen
	Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK SD	Bulan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)SD	Pembinaan Kompetensi PTK SD	%
	Pengawasan Kinerja PTK SD	%
	Pengembangan Karir PTK SD	%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Izin Operasional Sekolah	Dokumen
	Pembinaan Kelembagaan Sekolah	%
	Penerimaan Peserta Didik Baru	%
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Dokumen RAPBS/APBS	Dokumen
	Laporan Pengelolaan Dana BOS	Dokumen
Pembangunan Laboratorium SD	Laboratorium SD Baru	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SD	Ruang Laboratorium sekolah Terehabilitasi	%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
Penambahan Unit Sekolah Baru	Unit SMP Baru	%
Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	%
Penambahan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/Tata Usaha	Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Baru	%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Baru	%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Baru	%
Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	Ruang Guru Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang Kepala Sekolah Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Tata Usaha	Ruang Tata Usaha Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Terehabilitasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi	%
Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Mebel Sekolah	%
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah Terpelihara	%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Penyediaan Perlengkapan Sekolah	%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Penyediaan Perlengkapan Siswa/Peserta Didik	%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin/Rentan Miskin	%
	Verifikasi Data Peserta Didik Penerima PIP	%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat Praktik & Peraga Siswa	%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dukungan Pengembangan Kurikulum SMP	Dokumen
	Dukungan Penyelenggaraan Ujian SMP	%
	Peta Hasil Proses Belajar Mengajar SMP	Dokumen
Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Dukungan Pengembangan Karakter Peserta Didik	%

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
	Dukungan Pengembangan Minat, Bakat, & Kreativitas Siswa	%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bagi Satuan Pendidikan SMP	Dokumen Nominatif PTK SMP	Dokumen
	Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK SMP	Bulan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMP	Pembinaan Kompetensi PTK SMP	%
	Pengawasan Kinerja PTK SMP	%
	Pengembangan Karir PTK SMP	%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Izin Operasional Sekolah	Dokumen
	Pembinaan Kelembagaan Sekolah	%
	Penerimaan Peserta Didik Baru	%
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Dokumen RAPBS/APBS	Dokumen
	Laporan Pengelolaan Dana BOS	Dokumen
Pembangunan Laboratorium SMP	Laboratorium SMP Baru	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP	Ruang Laboratorium sekolah Terehabilitasi	%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		
Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%
Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Guru PAUD	Ruang Kelas/Guru Terehabilitasi	%
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang Kelas/Guru Terpelihara	%
Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Terehabilitasi	%

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Mebel Sekolah	%
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah Terpelihara	%
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Penyediaan Alat Rumah Tangga PAUD	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Penyediaan Perlengkapan PAUD	%
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Penyediaan Perlengkapan Siswa/Peserta Didik PAUD	%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin/Rentan Miskin	%
	Verifikasi Data Peserta Didik Penerima PIP	%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat Praktik & Peraga Siswa	%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dukungan Pengembangan Kurikulum PAUD	Dokumen
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bagi Satuan Pendidikan PAUD	Dokumen Nominatif PTK PAUD	Dokumen
	Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK PAUD	Bulan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)PAUD	Pembinaan Kompetensi PTK PAUD	%
	Pengawasan Kinerja PTK PAUD	%
	Pengembangan Karir PTK PAUD	%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Izin Operasional Sekolah	Dokumen
	Pembinaan Kelembagaan Sekolah	%
	Penerimaan Peserta Didik Baru	%
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Dokumen RAPBS/APBS	Dokumen

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
	Laporan Pengelolaan Dana BOP	Dokumen
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Penmbangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Ruang Kelas/Guru Baru	%
Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas/Guru Nonformal/ Kesetaraaan	Ruang Kelas/Guru Terehabilitasi	%
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Ruang Kelas/Guru Terpelihara	%
Pembangunan Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Terehabilitasi	%
Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Mebel Sekolah	%
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah Terpelihara	%
Pengadaan Alat Rumah Tangga Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Alat Rumah Tangga Nonformal/Kesetaraan	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Penyediaan Perlengkapan Sekolah	%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin/Rentan Miskin	%
	Verifikasi Data Peserta Didik Penerima PIP	%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat Praktik & Peraga Siswa	%
Penyelenggaraan Proses Belajar	Dukungan Pengembangan Kurikulum Nonformal/Kesetaraan	Dokumen

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Nominatif PTK Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
	Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK Nonformal/Kesetaraan	Bulan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kompetensi PTK Nonformal/Kesetaraan	%
	Pengawasan Kinerja PTK Nonformal/Kesetaraan	%
	Pengembangan Karir PTK Nonformal/Kesetaraan	%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Izin Operasional Sekolah	Dokumen
	Pembinaan Kelembagaan Sekolah	%
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Nonformal/Kesetaraan	Dokumen RAPBS/APBS	Dokumen
	Laporan Pengelolaan Dana BOS	Dokumen
Pembangunan Laboratorium Nonformal/Kesetaraan	Laboratorium Nonformal/Kesetaraan	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Nonformal/Kesetaraan	Ruang Laboratorium Nonformal/Kesetaraan	%
Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dukungan Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%

Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Satuan
Program Pengembangan Kurikulum		
Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Kurikulum Muatan Lokal PAUD	Dokumen
	Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		
Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan PTK Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan PTK Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
Dokumen Nominatif PTK SD & SMP	Dokumen Nominatif PTK SD & SMP	
Perhitungan dan Pemetaan PTK bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK SD & SMP	
	Pembinaan Kompetensi PTK SD & SMP	
	Pengawasan Kinerja PTK SD & SMP	
	Pengembangan Karir PTK SD & SMP	
Penataan Pendistribusian PTK bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Nominatif PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan	
	Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan	
	Pembinaan Kompetensi PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan	
	Pengawasan Kinerja PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan	
	Pengembangan Karir PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJPD
		Tahun 2023	Tahhun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka rata-rata lama sekolah	10,01	9,70	9,85	10,4	10,4
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	60,16%	66,10%	66,2%	85,5%	86,7%
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	94,14%	91,35%	91,45%	92%	94,14%
	Angka Partisipasi Murni					
4	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	97%	78,98%	92,18%	93%	97%
5	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	65%	56,54%	54,20%	60%	65%
6	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%	92,20%	92,25%	95%	100%
7	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%	97,54%	90,45%	93%	100%
	Angka partisipasi sekolah					
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	97%	78,99%	92,18%	93,10%	97%
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	65%	56,54%	54,20%	60%	65%
	Angka Putus Sekolah					

10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02%	0,10%	0,05%	0,04%	0,02%
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04%	0,15%	0,07%	0,06%	0,04%
	Angka Kelulusan:					
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%
14	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM):					
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,9%	99,90%	99,90%	99,90%	99,9%
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,9%	99,90%	99,90%	99,9%	99,9%
	Fasilitas Pendidikan:					
20	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	99,66	99,67	99,68	99,75	99,75
21	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:35	1:36	1:37	1:39	1:39
22	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:08	1:12	1:13	1:20	1:20
23	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:22	1:23	1:24	1:25	1:25
24	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:22	1:23	1:24	1:25	1:25
25	Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	151,96	153,56	154,65	155,91	155,91
28	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%	95,10%	96,6%	98,5%	98,5%

BAB VIII

PENUTUP

Dalam undang-undang. Sistem Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui visi dan misinya menjabarkan program pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang salah satunya harus ditunjang oleh program pembangunan di bidang pendidikan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa 2024 – 2026 ini. Adapun Renstra pendidikan ini merupakan kesinambungan dari Renstra dan hasil kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Renstra Pendidikan Kabupaten Minahasa tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di Kabupaten Minahasa dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan

Di tetapkan di Tondano,
Pada tanggal Desembaer 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Minahasa,



H. TOMMY WUWUNGAN, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661112 199103 1 014